

**PENGADAAN BARANG ALAT TULIS MELALUI
E-PROCUREMENT DI BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh : Muhammad Arly Berliansyah

NIM. 07011382025210

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PENGADAAN BARANG ALAT TULIS MELALUI
***E-PROCUREMENT* DI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memenuhi
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik

Diajukan Oleh :

Muhammad Arly Berliansyah

NIM. 07011382025210

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 10 Juli 2024

Pembimbing

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM SKRIPSI
PENGADAAN BARANG ALAT TULIS MELALUI
E-PROCUREMENT DI BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 22 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

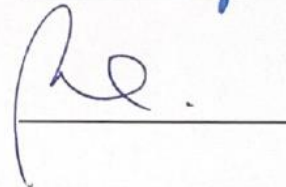
1. **Dr. Lili Erina, M.Si**
Ketua



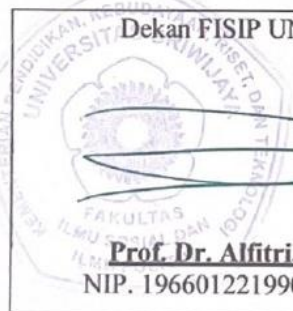


1. **Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si**
Anggota



2. **Junaidi, S.IP., M. Si**
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI</p>  <p><u>Prof. Dr. Alfitri, M.Si</u> NIP. 196601221990031004</p>	 <p>Ketua Jurusan Administrasi Publik</p>  <p><u>Dr. M Nur Budivanto, S. Sos., MPA</u> NIP. 196911101994011001</p>
--	--

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arly Berliansyah

NIM : 07011382025210

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Pengadaan Barang Alat Tulis Melalui *E-Procurement* di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Yang Membuat Pernyataan

Palembang, 10 Juli 2024



Muhammad Arly Berliansyah

NIM. 07011382025210

MOTTO & PERSEMBAHAN

**“Hidup Ini Tentang Tanggung Jawab dan Punya Visi Misi Yang Jelas.
Kita Hanya Butuh Disiplin Bukan Motivasi.”
-MUHAMMAD ARLY BERLIANSYAH-**

**Atas Rahmat allah SWT, skripsi ini saya persembahkan
untuk**

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta, Bapak Arbin dan Bunda Tirna Yelly**
- 2. Adik dan Seluruh Keluarga Besar**
- 3. Pimpinan, Dosen, Staff dan Seluruh Civitas Akademika FISIP UNSRI**
- 4. Teman Seperjuangan dan Afifah Putri Mevtilina**
- 5. Almamater Kebanggaan Saya, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul “Pengadaan Barang Alat Tulis Melalui E-Procurement Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan”.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu Tirna Yelly dan Arbin yang mendukung dan mendoakan setiap hal baik yang penulis lakukan, terutama dalam menjalankan proses pendidikan. Dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA dan Bapak Januar Eko S.IP, SH, M.Si selaku Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Annada Nasyaya S.IP M.Si sebagai dosen pembimbing akademik yang senantiasa membantu penulis dari awal semester hingga proses penyelesaian skripsi
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak menyumbangkan pikiran, saran dan kritikan untuk menunjang keberhasilan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani perkuliahan mapun saat proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Tetra Riani, S.Kom., MT selaku Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
8. Bapak/Ibu pegawai Biro Pengadaan Barang dan jasa Setda Provinsi Sumatera

Selatan

9. Afifah Putri Mevtalina, S.Kom., Putri sulung dari Bapak Dr. Welly Nailis, S.E., MM dan Ibu Evi Murtini, S.H yang senantiasa menemani penulis baik dalam keadaan susah maupun senang
10. Timothy Ronald yang sangat memacu saya untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman Sley Oley dan teman magang yang senantiasa bersedia untuk membantu penulis dikala kesulitan dalam menyelesaikan skripsi
12. Terima kasih untuk diri yang telah bertahan sejauh ini ditengah kegaduhan duniawai, tetaplah kuat jalan kedepan, semoga dirimu sukses dikemudian hari dan menjadi bermanfaat untuk banyak orang.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan Skripsi ini.

Palembang, 10 Juli 2024

Penulis,



Muhammad Arly Berliansyah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Keefektifan Pengadaan Barang Alat Tulis Melalui *E-Procurement* di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini menggunakan teori pengadaan barang secara elektronik Menurut Kalakota dan Robinson berdasarkan pemesanan barang, pemenuhan barang, dan pembayaran barang. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada Lima orang informan. Sampel dikumpulkan dengan menggunakan Teknik analisis data Miles dan Huberman dengan cara kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengadaan barang yang melalui *E-Procurement* di Biro pengadaan barang dan jasa Setda Provinsi Sumatra Selatan pada alur pemesanan dan alur pemenuhan barang terintegrasi dalam aplikasi E-Katalog. Sedangkan proses pembayaran belum terintegrasi dalam aplikasi E-Katalog namun untuk alur pelaporannya sudah terintegrasi di SIPD BPKAD.

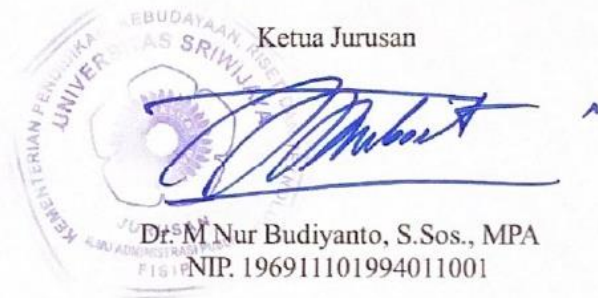
Kata Kunci: Pengadaan Barang, *E-procurement*, dan E-Katalog

Dosen Pembimbing



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the effectiveness of procuring stationery goods via e-procurement at the Procurement Bureau of Goods and Services Regional Secretariat of South Sumatra Province. This research uses the theory of electronic procurement according to Kalakota and Robinson based on ordering goods, providing goods and paying for goods. The research method used is a qualitative approach. Data was collected by observation, interviews and documentation with five informants. Samples were collected using Miles and Huberman data analysis techniques by condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research show that when procuring goods via E-Procurement at the Regional Secretariat of South Sumatra Provincial Goods and Services Procurement Bureau, the order flow and flow of goods are integrated in the E-Catalog application. Meanwhile, the payment process has not been integrated in the E-Catalog application, but the reporting flow has been integrated in the BPKAD SIPD.

Keywords: *Procurement of Goods, E-procurement, and E-Catalog*

Dosen Pembimbing



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



Ketua Jurusan
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa.....	8
2.2. Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa.....	10
2.3. Objek Pengadaan Barang Dan Jasa	11
2.4. Fungsi Pengadaan Barang Dan Jasa	13
2.5. Metode Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa.....	14
2.6. E-Government	16
2.7. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	18
2.8. Konsep E-catalogue.....	24
2.9. Teori Pengadaan Barang Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>).....	32
2.10 Penelitian Terdahulu.....	38
2.11. Kerangka Pemikiran	44

BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
3.1. Jenis Penelitian	46
3.2. Definisi Konsep.....	47
3.3. Fokus Penelitian	50
3.4. Jenis dan Sumber Data	51
3.5. Informan Penelitian	52
3.6. Teknik Pengumpulan Data	53
3.7. Teknik Analisis Data	54
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	55
3.9. Jadwal Penelitian	56
3.10. Sistematika Penulisan	57
BAB IV	59
GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	59
4.2. Visi Misi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan	63
4.2.1. Visi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.....	63
4.2.1. Misi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.....	63
4.3. Visi Misi Biro Pengadaan Barang/Jasa.....	64
4.3.1 Visi Biro Pengadaan Barang/Jasa	64
4.3.2. Misi Instansi.....	64
4.4. Visi Misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).....	65
4.4.1 Visi LPSE.....	65
4.4.2. Misi LPSE.....	65
4.5. Struktur Organisasi	66
4.6 Pengadaan Barang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Sumatera Selatan.....	66
4.6.1. Pemesanan Barang.....	67
4.6.1.1 Analisis <i>Search & Select</i> (Cari dan Pilih) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda.....	71
4.6.1.2 Analisis <i>Requisition</i> (Pengajuan) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Setda	71
4.6.1.3 Analisis <i>Approval & Purchase</i> (Persetujuan dan Pembelian) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda.....	73
4.6.2. Pemenuhan Barang	75
4.6.2.1 Analisis <i>Pick, Pack, dan Ship</i> (Pilih, Kemas, dan Kirim) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda.....	78
4.6.2.2 Analisis <i>Tracking</i> (Pelacakan) Di Biro Pengadaan Barang dan Jasa setda Provinsi Sumatera Selatan.....	79
4.6.2.3 Analisis <i>Tracking</i> (Pelacakan) Di Biro Pengadaan Barang dan Jasa setda Provinsi Sumatera Selatan.....	79
4.6.3. Pembayaran Barang	82
4.6.3.1 Analisis <i>Invoicing</i> (Faktur) Di Biro Pengadaan Barang dan Jasa setda Provinsi Sumatera Selatan.....	85
4.6.3.2 <i>Payment</i> (Pembayaran)	86
4.6.3.3 <i>Reporting</i> (Pelaporan).....	87
4.7. Pembahasan	88
BAB V	95
PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Garis besar Proses PBJ	9
Gambar 2. 2 Web layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	22
Gambar 2. 3 Tampilan Home E-catalogue	25
Gambar 2. 4 Tampilan syarat dan ketentuan E-catalogue	28
Gambar 2. 5 Tiga Aliran Proses Kritis.....	35
Gambar 4. 1 Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.....	60
Gambar 4. 2 Profil Brio PBJ.....	64
Gambar 4. 3 Profil bagian LPSE	65
Gambar 4. 4 Gambar Visi Misi LPSE	65
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi	66
Gambar 4. 6 Tampilan awal untuk mencari dan memilih barang.....	71
Gambar 4. 7 Tampilan pengajuan permintaan barang.....	72
Gambar 4. 8 Tampilan Persetujuan barang yang diajukan untuk pengadaan	73
Gambar 4. 9 Barang fisik yang telah diterima oleh pengada.....	80
Gambar 4. 10 <i>Invoice</i> faktur pembayaran pengadaan barang	86
Gambar 4. 11 Transaksi pembayaran pengadaan barang	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Kerangka Pemikiran	45
Tabel 3.2 Fokus Penelitian	50
Tabel 4.1 Tabel Matriks Hasil dan Pembahasan penelitian.....	91

DAFTAR SINGKATAN

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja
LKPP	= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa pemerintah
SIRUP	= Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
LPSE	= Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PerPres	= Peraturan Presiden
PP	= Pejabat Pengadaan
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
PPHP	= Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
PPTK	= Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUP	= Rencana Umum Pengadaan
SETDA	= Sekretariat Daerah
UKPBJ	= Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 Menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diawali dari proses identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan (Try Desmayanti,2022). Setiap instansi pemerintah akan selalu memerlukan barang dan jasa, dimana untuk pengadaannya dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah bagian terpenting dari operasi pemerintahan. Aksesibilitas barang dan jasa merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat selain kebutuhan untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah membeli barang dan jasa dengan cara yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Tujuan pengadaan barang dan jasa ini adalah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan serta dalam jumlah dan kualitas yang tepat pada waktunya. Salah satu elemen penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan

efisien. Dalam hal ini, salah satu bentuknya adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, yang melibatkan penggunaan transaksi elektronik dan teknologi informasi.

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan mengadopsi sistem *e-government* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, yang dikenal sebagai *e-procurement*. Pemanfaatan teknologi ini merupakan upaya terhadap tantangan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Penyimpangan yang terjadi antara pejabat pengadaan dan penyedia sering terjadi karena proses pengadaan barang dan jasa konvensional, yang melibatkan proses manual dari pengumuman hingga serah terima pekerjaan secara langsung secara tatap muka. Penelitian sebelumnya mengenai pengadaan barang dan jasa secara konvensional telah menunjukkan dampak negatif, seperti praktik suap untuk memenangkan tender, proses tender yang tidak transparan, kurangnya persaingan yang sehat di antara para penyedia, pembatasan spesifikasi teknis yang hanya bisa dipenuhi oleh satu pelaku usaha tertentu, serta partisipasi pengusaha tanpa dokumen administrasi yang lengkap namun tetap dapat mengikuti dan memenangkan tender (Udoyono dalam Siallagan & Dwijatenaya, 2022:113).

Pendekatan awal pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa masih bersifat tradisional, yang melibatkan proses manual mulai dari proses pengumuman hingga serah terima hasil pekerjaan secara langsung dan tatap muka. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan yang melibatkan pejabat pengadaan dan penyedia. Karena

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih manual menyebabkan tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka pihak-pihak tertentu kerap memanfaatkan proses pengadaan pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Mengingat banyaknya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka proses pengadaan yang sebelumnya masih bersifat tradisional dan dianggap banyak menimbulkan permasalahan, telah beralih ke pengadaan secara elektronik melalui penggunaan aplikasi E-Procurement yang secara langsung diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan demikian, proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi di kalangan penyedia dan penerima pengadaan barang dan jasa. E-procurement merupakan gagasan digitalisasi yang sistematis dan relevan yang melibatkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, *e-procurement* digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, memungkinkan penggunaan sistem katalog elektronik untuk melakukan pembelian barang/jasa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, tentu harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan

bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi, harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Biro ini merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi dan memiliki peran penting dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Biro ini memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk memenuhi fungsinya di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan, pengadaan barang seperti alat tulis kantor sangat penting.

Barang alat tulis kantor adalah alat-alat yang digunakan dalam kegiatan administrasi kantor, seperti alat tulis, peralatan komputer, dan lain-lain. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan, pengadaan barang Alat tulis termasuk dalam kategori pengadaan barang yang diperlukan untuk kegiatan operasional kantor. Pengadaan alat tulis kantor bagi sebuah perusahaan atau dinas pemerintahan memiliki biaya yang cukup besar, yang membuat sebuah perusahaan atau dinas pemerintahan harus dengan bijak memperhatikan pengendalian dalam pengadaan alat tulis kantor agar tidak terjadinya penghamburan biaya dalam pengadaan alat tulis kantor. Dalam proses pengadaan, bagi instansi pemerintah harus melalui beberapa tahapan mulai dari penyeleksi merek, fungsi, spesifikasi, jenis, penetapan untuk vendor sampai dengan penetapan biaya serta waktu dari pembelian untuk pengadaan alat tulis kantor yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau dinas pemerintahan.

Proses pengadaan barang dan jasa sekarang memerlukan teknologi informasi

dan komunikasi. E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang mendaftarkan berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah dengan harga, jenis, dan spesifikasi teknis. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengatur ketentuan teknis operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pembentukan LPSE diatur oleh Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, LPSE harus memenuhi persyaratan Undang-Undang. Pada tahun 2018, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi diubah oleh Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021. Pada tahun 2023, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2023 mengatur percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selama 40 hari KKA (Kuliah Kerja Administrasi) di Setda Provinsi Sumatera Selatan, peneliti menemukan bahwa masih ada hambatan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang disebabkan oleh pengadaan barang melalui E-Procurement di Biro Pengadaan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa kendala dalam proses pengadaan termasuk vendor yang menanggapi dengan lambat, ketersediaan barang yang tidak terdaftar dalam E-Catalogue, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Penelitian sebelumnya tentang pengadaan barang secara elektronik banyak diteliti. Misalnya, penelitian oleh Try Desmayanti et al. (2022), penelitian oleh Afdal Hafiz (2022), penelitian tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik oleh Mawarni et al. (2020), dan penelitian tentang penerapan prinsip

pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi dan katalog elektronik oleh Mawarni et al. (2020). Namun, penelitian tentang pengadaan barang tulis melalui E-Procurement belum banyak dilakukan, terutama di lembaga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu aspek baru dalam penelitian ini adalah penggunaan teori pengadaan secara elektronik dengan lokus pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Sumatera Selatan..

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat betapa pentingnya mengatasi masalah pengadaan barang secara elektronik di sektor publik, penelitian lebih lanjut diperlukan tentang pengadaan barang alat tulis secara elektronik melalui E-Procurement di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengadaan barang alat tulis secara elektronik di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan penjelasan dan fenomena yang diuraikan di atas. “Bagaimana keefektifan Pengadaan Barang Alat Tulis Melalui *E-Procurement* di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Keefektifan Pengadaan Barang Alat Tulis Melalui *E-Procurement* di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan mendorong lebih banyak penelitian terkait manajemen keuangan sektor publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai masukan bagi LPSE Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem *E-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C. S. (2017). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. *Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3.
- Benny, B., Nugroho, N., Hutabarat, F. A. M., Supriyanto, S., & Arwin, A. (2021). Motivasi Kerja Karyawan PT Abdi Wibawa Press Medan. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, 3(1), Article 1.
- Cahyani, R. S. (2017). Analisis Penerapan *E-Procurement* Dalam Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt Inalum (Persero). 8.
- Desmayanti, S., Muhammad, A., Setiawan, R. (2022). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi Kepulauan Riau. *Student Online Journal*, 3(1).
- Faisal, M. (2017). Implementasi *E-Procurement* Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Disfaslanal. *Strategi Pertahanan Laut Vol 3*.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta. <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>
- Hafiz, J. (2022). Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Jambi). *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(2).
- Heriawati, L. (2018). Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang2.
- Hidayat, R. (2015). Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah. *Ketahanan Nasional*, 122.
- Kalakota, Ravi & Maria Robinson. 2001. *E-Business 2.0: Roadmap For Success*.
- Malik, A. (2017). *Teori Pengadaan Barang Dan Jasa*. 2.

- Mawarni, M., Gamaputra, G., Diana, S. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi *E-Purchasing* dan *E-Katalog*. *Jurnal Wacana Publik*, 14(02).
- Michael Nelsen Lumintang, V. A. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 107.
- Rahmalina, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Eletronik Di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Riswanti, R. M. (2018). Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017. 25.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), Article 33. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Siallagan, R., Bagus Made Agung Dwijatenaya, I., & Musmuliadi. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIMAP)*, 1(1), 112–124.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 4 Tahun 2017 Ta Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007 Tentang Barang Milik Negara/Daerah Spian,
- A. (2014). Dasar – Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Media Sutedi*, A.(2012). *Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*.
- Sinar Grafika Undang-undang No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

- Sumakul, Y., & Ruata, S. (2020). Kesejahteraan psikologis Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Psychology "Humanlight"*, 1(1), Article <https://doi.org/10.51667/jph.v1i1.302>
- Syah, J. M., & Sofyan, D. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP di Kampung Paledang Suci Kaler pada Materi Segiempat dan Segitiga. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31980/plusminus.v1i2.1270>
- Takdir, I., Ismail, A., Fitriyaningsi, J., & Suhardianto. (2022). Dampak Media Online Dalam Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pada Masa Pandemi Covid-19 MTS Muhammadiyah Takwa. *EDULEC : Education, Language And Culture Journal*, 2(1), Article <https://doi.org/10.56314/edulec.v2i1.29>
- Undang-undang No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
- Priambadi, K., & Nurcahyo, A. (2018). Tradisi Jamasan Pusaka Di Desa Baosan Kidul Kabupaten Ponorogo (Kajian Nilai Budaya Dan Sumber Pembelajaran Sejarah). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i2.2678>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>